

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan, membuka kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Sebagai negara dengan karakteristik agraris, arah pembangunan pertanian di Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada pengembangan kawasan pertanian yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal daerah. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia memegang peran kunci dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan pertanian secara efektif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan II tahun 2025, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,83% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menempatkannya sebagai sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan.

Pengembangan kawasan pertanian merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan integrasi berbagai potensi suatu kawasan. Riyadi dan Bratakusumah (2005) menyatakan bahwa pendekatan berbasis kawasan bertujuan mengintegrasikan potensi sumber daya wilayah, sehingga pengembangan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memerlukan perencanaan yang komperhensif dan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan.

Dalam tahapan perumusan hingga evaluasi kebijakan publik, keberadaan data menjadi elemen krusial yang digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Riant Nugroho (2017) menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik yang berkualitas perlu ditopang oleh data serta informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan dalam pengembangan kawasan pertanian sangat ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan data yang memadai serta mutu pengelolaan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.

Selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengembangkan aplikasi e-Kawasan sebagai platform digital untuk mengintegrasikan data kawasan pertanian. Aplikasi ini diharapkan mampu mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian secara nasional melalui penyediaan data yang terpusat dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan pertanian secara nasional memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian. Peraturan ini menegaskan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang terintegrasi, berbasis potensi wilayah, serta didukung oleh sistem perencanaan dan pengelolaan data yang terpadu. Permentan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang lokasi Kawasan Pertanian Nasional yang menetapkan lokasi, luasan, dan komoditas kawasan pertanian secara akurat dan terintegrasi menjadi semakin krusial.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengembangkan aplikasi e-Kawasan sebagai sistem informasi perencanaan pembangunan pertanian berbasis kawasan. Aplikasi e-Kawasan tidak hanya berfungsi sebagai media pendataan, tetapi juga sebagai instrument perencanaan dan pengambilan kebijakan yang mengintegrasikan data tabular dan data spasial, serta rencana aksi. Dengan demikian, e-Kawasan memiliki posisi strategis sebagai alat pendukung utama dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian nasional.

Namun demikian, dalam implementasinya pemanfaatan aplikasi e-Kawasan masih menghadapi berbagai kendala. Pada tahap awal peluncuran aplikasi, terjadi kebijakan *automatic adjustment* yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi aplikasi kepada pemerintah daerah. Akibatnya, hingga saat ini sosialisasi aplikasi e-Kawasan baru dilakukan di beberapa provinsi, yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi D.I.Yogyakarta, provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku. Kondisi ini

menyebabkan pemahaman dan adopsi aplikasi e-Kawasan di daerah lain masih terbatas.

NO	ESELON I	AUTOMATIC ADJUSTMENT (Rp)		
		SEMULA	RELAKSASI	MENJADI
<b>TOTAL</b>		<b>453.043.044.000</b>	<b>(31.213.635.000)</b>	<b>421.829.409.000</b>
1	Sekretariat Jenderal	70.095.032.000	-	70.095.032.000
2	Inspektorat Jenderal	47.692.326.000	-	47.692.326.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	42.967.689.000	-	42.967.689.000
4	Ditjen Hortikultura	40.281.266.000	-	40.281.266.000
5	Ditjen Perkebunan	57.288.869.000	-	57.288.869.000
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	28693545000	-	28693545000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	73.781.066.000	(9.500.000.000)	64.281.066.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	65.315.616.000	-	65.315.616.000
9	Badan PPSDM Pertanian	26.927.635.000	(21.713.635.000)	5.214.000.000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	-	-	-

**Gambar 1. 1 Rincian Automatic Adjustment Kementerian Pertanian per eselon 1 Tahun 2024**

Sumber: Lakin Kementerian Pertanian 2024

DG	Sosialisasi Permentan dan Kepmentan Pengembangan Kawasan Pertanian Pulau Sumatera			60,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V )			115,000	2	RM
	- Biaya Fotocopy	460.0 LBR	250	115,000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V )			5,500,000	2	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon II (1 Org x 1 OJ x 1Keg)	1.0 OJ	1,000,000	1,000,000	*	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon III/IV (5 Org x 1 OJ x 1Keg)	5.0 OJ	900,000	4,500,000	*	
DF	Sosialisasi Permentan dan Kepmentan Pengembangan Kawasan Pertanian Pulau Jawa			60,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V )			115,000	2	RM
	- Biaya Fotocopy	460.0 LBR	250	115,000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V )			5,500,000	2	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon II (1 Org x 1 OJ x 1Keg)	1.0 OJ	1,000,000	1,000,000	*	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon III/IV (5 Org x 1 OJ x 1Keg)	5.0 OJ	900,000	4,500,000	*	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V )			54,385,000	A	RM
	> Dalam rangka Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat			54,385,000		
	- Transport dalam rangka Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat (9 orang X 1 Hari X 1 Kegiatan)	9.0 OP	170,000	1,530,000	*	
	- Ulang saku Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat dalam kota (9 orang X 1 Hari X 1Kegiatan)	9.0 OP	95,000	855,000	*	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jakarta)	130.0 OH	400,000	52,000,000	*	

DH	Sosialisasi Permentan dan Kepmentan Pengembangan Kawasan Pertanian Pulau Kalimantan				60,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V )				115,000	2	RM
	- Biaya Fotocopy	460.0 LBR	250		115,000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V )				5,500,000	2	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon II (1 Org x 1 OJ x 1Keg)	1.0 OJ	1,000,000		1,000,000	*	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon III/IV (5 Org x 1 OJ x 1Keg)	5.0 OJ	900,000		4,500,000	*	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V )				54,385,000	A	RM
	> Dalam rangka Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat				54,385,000		
	- Transport dalam rangka Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat (9 orang X 1 Hari X 1 Kegiatan)	9.0 OP	170,000		1,530,000	*	
	- Uang saku Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat dalam kota (9 orang X 1 Hari X 1Kegiatan)	9.0 OP	95,000		855,000	*	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jakarta)	130.0 OH	400,000		52,000,000	*	
DI	Sosialisasi Permentan dan Kepmentan Pengembangan Kawasan Pertanian Pulau Sulawesi				60,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V )				115,000	2	RM
	- Biaya Fotocopy	460.0 LBR	250		115,000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V )				5,500,000	2	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon II (1 Org x 1 OJ x 1Keg)	1.0 OJ	1,000,000		1,000,000	*	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon III/IV (5 Org x 1 OJ x 1Keg)	5.0 OJ	900,000		4,500,000	*	
DJ	Sosialisasi Permentan dan Kepmentan Pengembangan Kawasan Pertanian Wilayah Timur (Bali Nusa Papua dan Maluku)				60,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V )				115,000	2	RM
	- Biaya Fotocopy	460.0 LBR	250		115,000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V )				5,500,000	2	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon II (1 Org x 1 OJ x 1Keg)	1.0 OJ	1,000,000		1,000,000	*	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Eselon III/IV (5 Org x 1 OJ x 1Keg)	5.0 OJ	900,000		4,500,000	*	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V )				54,385,000	A	RM
	> Dalam rangka Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat				54,385,000		
	- Transport dalam rangka Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat (9 orang X 1 Hari X 1 Kegiatan)	9.0 OP	170,000		1,530,000	*	
	- Uang saku Sosialisai Renstra Kementan 2025-2029 wilayah barat dalam kota (9 orang X 1 Hari X 1Kegiatan)	9.0 OP	95,000		855,000	*	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jakarta)	130.0 OH	400,000		52,000,000	*	

**Gambar 1. 2 Rician Automatic Adjustment Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera**

Sumber: Dokumen Rahasia Kementerian Pertanian

Terbatasnya sosialisasi tersebut berdampak langsung pada kelengkapan data yang tersedia dalam aplikasi e-Kawasan. Data kawasan pertanian yang harusnya bersifat nasional dan komperhensif menjadi belum sepenuhnya terhimpun. Oleh karena itu, data yang lengkap dan mutakhir merupakan prasyarat utama bagi pemanfaatan sistem informasi sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan. Indrajit (2016) menegaskan bahwa keberhasilan sistem informasi

pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan data yang dikelola, bukan semata oleh kecanggihan teknologi yang digunakan. Selain permasalahan sosialisasi, kendala lain yang dihadapi dalam pemanfaatan aplikasi e-Kawasan adalah proses penginputan data. Pengisian data dalam aplikasi e-Kawasan dilakukan oleh dinas pertanian kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis di daerah. Namun, dalam praktiknya, penginputan data tersebut belum didukung oleh regulasi yang bersifat kuat dan mengikat. Tidak adanya kewajiban formal atau sanksi yang jelas menyebabkan tingkat kepatuhan daerah dalam melakukan pengisian data menjadi bervariasi. Pada beberapa daerah, pengisian data belum menjadi prioritas sehingga data tidak diinput secara rutin.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pengembangan sistem informasi di tingkat pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Dalam perspektif administrasi publik, permasalahan ini berkaitan dengan aspek koordinasi, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan. Sedarmayanti (2018) menyatakan bahwa *good governance* hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan dikelola secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Tanpa dukungan regulasi yang jelas dan komitmen bersama, pemanfaatan sistem informasi tidak akan berjalan optimal.

Dengan demikian, permasalahan pengembangan kawasan pertanian melalui aplikasi e-Kawasan tidak hanya terletak pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga mencakup aspek sosialisasi, tata kelola data, koordinasi pusat dan daerah, serta dukungan regulasi. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan data dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Optimalisasi Data dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Aplikasi e-Kawasan” menjadi penting untuk dilakukan, karena penelitian ini diharapkan dapat mengkaji secara mendalam bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan data dalam aplikasi e-Kawasan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi strategis guna mendukung optimalisasi data sebagai

dasar pengembangan kawasan pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

## **1.2 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar ke pembahasan di luar fokus kajian, maka perlu ditetapkan batasan penelitian. Penelitian ini hanya membahas optimalisasi data dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui aplikasi e-Kawasan. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana ketersediaan, kualitas, dan integrasi data dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pertanian.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada peran sistem informasi e-Kawasan sebagai media pengelolaan dan pemanfaatan data, khususnya dalam mendukung perencanaan pengembangan kawasan. Penelitian ini tidak membahas secara teknis terkait pengembangan aplikasi, seperti aspek pemrograman, keamanan sistem, maupun arsitektur teknologi informasi secara mendalam, melainkan lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan dan pemanfaatan sistem oleh para pengguna.

Secara lokasi, penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Sukabumi, serta Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh kondisi implementasi e-Kawasan di seluruh daerah di Indonesia, melainkan menggambarkan kondisi pada lokasi penelitian yang ditentukan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah: “Bagaimana optimalisasi data mendukung penerapan pengembangan kawasan pertanian melalui aplikasi e-Kawasan?”.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis proses optimalisasi data yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian, khususnya melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis digital seperti e-Kawasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana sistem informasi e-Kawasan berperan dalam mendukung pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan pertanian.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks pengelolaan data (*governance*) dan penggunaan sistem informasi dalam mendukung perencanaan pengembangan kawasan pertanian.
  - Menjadikan rujukan akademis bagi penelitian berikutnya dalam meneliti peran sistem informasi *e-government* seperti e-Kawasan dalam meningkatkan efisiensi data sektor publik.
2. Manfaat Praktis
  - Untuk peneliti melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah, sistematis, dan metodologi serta memiliki kemampuan menganalisa permasalahan.
  - Untuk Kementerian Pertanian, sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan informasi mengenai sejauh mana sistem aplikasi e-Kawasan berperan dalam mendukung pemanfaatan data untuk perencanaan pengembangan kawasan pertanian.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulisan disusun ke dalam tiga bab utama dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai urgensi dan konteks penelitian.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas kajian teori yang relevan dengan fokus penelitian, termasuk teori-teori tentang optimalisasi data. Selain itu, ditampilkan pula hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

- **BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Metodologi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah.

- **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian berdasarkan wawancara dari para narasumber, dan pembahasan dari hasil wawancara mengenai Optimalisasi Data dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Aplikasi e-Kawasan.

- **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir ini juga terlampir daftar pustaka, lampiran – lampiran, dokumentasi penelitian dan biodata penulis.